



JURNAL ISIP VOICE

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 3 No. 1, January-June 2024, pages: 21-28

ISSN: 2963-1874

<http://dx.doi.org/10.58222/jiv.v3i1.973>

## Evaluation Of 12 Years Of Compulsory Education Policy In Pendopo Barat District, Empat Lawang Regency, South Sumatra Province

### Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan



Hardiansyah<sup>a</sup>  
Henny Aprianty<sup>\*b</sup>  
Hernowo Noviyanto<sup>c</sup>

#### Article history:

Submitted: 13-06-2024

Revised: 23-06-2024

Accepted: 30-06-2024

#### Keywords:

Compulsory Education,  
Evaluation, and Program.

#### Abstract

Based on Decree No. 47 of 2008 of the Government of the Republic of Indonesia concerning Compulsory Education, Article 1(1) states that "compulsory education is a minimum program that must be followed by Indonesian citizens which is the responsibility of the government and regional governments". Based on the results of observations made by researchers on Tuesday 19 December 2023 at 09.00 (Education Office of Empat Lawang District), the author found problems that emerged in the field, namely obstacles in implementing the 12 year compulsory education. Empat Lawang District Education Program. First, the level of purchasing power participation in education funding is still low. It can be said that the Intervention Stage has shortcomings in terms of planning. Because the regulations for the 12 year compulsory education program are based on the National Education System Law, program facilities are lacking due to limited student capacity, a shortage of teaching staff (Teachers) and a very limited APBD for the construction of new school units (USB), as well as renovation of school buildings which are still old buildings. The Determinant Stage can be categorized as less successful, due to the school's capacity being still inadequate, School Operational Assistance (BOS) from the central government routinely decreasing every year. The Impact Phase can be said to be successful because the HDI of Empat Lawang Regency was better in 2012, plus the percentage results of the Gross Participation Rate (APK) and Pure Participation Rate (APM) were also very high.

**Keywords: Compulsory Education, Evaluation, and Programme.**

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

<sup>c</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

### Abstrak

Berdasarkan Surat Keputusan No. 47 Tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia tentang Wajib Belajar, Pasal 1(1) menyatakan bahwa “wajib belajar adalah program minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Hasil observasi yang dilakukan (Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang), penulis menemukan permasalahan yang muncul di lapangan yaitu kendala dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Program Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Pertama, tingkat partisipasi daya beli terhadap pendanaan pendidikan masih kurang. Tahap Intervensi dapat dikatakan terdapat kekurangan dari segi perencanaan. Karena pada regulasi program wajib belajar 12 tahun ini didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Fasilitas Program yang kurang dengan terbatasnya daya tampung peserta didik, kurangnya tenaga pendidik (Guru) dan APBD yang sangat pas-pasan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) serta renovasi gedung-gedung sekolah yang masih merupakan bangunan lama. Tahap Determinan dapat dikategorikan dalam keberhasilan kurang, dikarenakan daya tampung sekolah yang masih kurang memadai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang sudah rutin turun setiap tahunnya. Tahap Dampak dapat dikatakan berhasil dikarenakan IPM Kabupaten Empat Lawang sudah lebih baik pada 2012 ditambah lagi dengan hasil persentase dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang juga sangat tinggi.

**Kata kunci : Wajib belajar, Evaluasi, dan Program.**

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2024.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

#### **Corresponding author:**

Henny Aprianty\*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: [henny@unihaz.ac.id](mailto:henny@unihaz.ac.id)

---

### 1Pendahuluan

Wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan yang dirancang oleh pemerintah suatu Negara (Dodi, 2019). Wajib belajar berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kebijakan pemerintah (Puspitasari, 2012). Berdasarkan Surat Keputusan No. 47 Tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia tentang Wajib Belajar, Pasal 1(1) menyatakan bahwa “wajib belajar adalah program minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Wajib belajar merupakan salah satu program yang mendapat perhatian intensif dari Kementerian Pendidikan (Depdiknas) (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Pendidikan Jarak Jauh, 2013). Program ini mewajibkan warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari Tingkat 1 SD (Sekolah Dasar) sampai Kelas 9 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sekolah lainnya (Karding, 2008).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 09.00 (Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang), penulis menemukan permasalahan yang muncul di lapangan yaitu kendala dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Program Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Pertama, tingkat partisipasi daya beli terhadap pendanaan pendidikan masih kurang.

Untuk Menyelesaikan masalah Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang mengupayakan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga yang tinggal di Kabupaten Empat Lawang, dan dalam program wajib belajar 12 tahun ini memiliki tujuan agar masyarakat Kabupaten Empat Lawang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pada pribadi masing-masing agar dapat hidup mandiri dan dapat berkembang

didalam masyarakat, dan tantangan yang dihadapi dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Soekartawi, 2006). Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang ada terutama di Kabupaten Empat Lawang ini diharapkan dapat mengurangi hambatan karena terbatasnya dana, serta kondisi yang menjadi penghambat terlaksananya program wajib belajar 12 tahun ini. Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan, Kabupaten Empat Lawang baru beberapa tahun belakangan ini menerapkan program wajib belajar 12 tahun ini dan peneliti melihat keadaan masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui adanya program wajib belajar 12 tahun ini. Karena itu penulis tertarik dengan judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat sehingga program wajib belajar 12 tahun ini belum terlaksana dengan baik.

*Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:*

- a. Untuk mengidentifikasi Evaluasi Intervensi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang
- b. Untuk mengetahui evaluasi Determinan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang
- c. Untuk mengetahui evaluasi Dampak Program Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang

Penelitian ini mengacu pada model evaluasi change model, yaitu intervensi atau perlakuan yang penting untuk mencapai tujuan program (Tsyh Chen, 2005). Komponen dari *change model* adalah sebagai berikut:

- a. Intervensi atau perlakuan (*intervention or treatment*)
- b. Faktor penentu (determinants)
- c. Tujuan dan dampak (*goal and outcomes*).

## **2Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Menurut Creswell & Poth, (2016) metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Bogdan dan Taylor (1975) dalam (Purnawan, 2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati atau yang disebut dengan narasumber. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder (Purnawan, 2020). Penelitian atau pengkaji akan masuk secara langsung ke lapangan untuk memunculkan representasi yang di dapat dari catatan lapangan yang berupa wawancara, fotografi, rekaman ataupun catatan pribadi (Purnawan, 2021).

## **3Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

#### **a. Intervensi atau Perlakuan (*Intervention Or Treatment*)**

Intervensi adalah campur tangan sebuah negara dengan cara diktator mengenai urusan daerah dengan dimaksudkan untuk memelihara atau mengubah suatu situasi, keadaan, pada daerah tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bertepatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan menurut Bapak Drs. Jhon Heri selaku Kepala Dinas Pendidikan tentang bagaimana intervensi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Empat Lawang. Dari hasil wawancara diatas mengenai intervensi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Empat Lawang dapat dikatakan kurang karena sedikitnya anggaran dana yang diberikan sehingga sarana dan prasarana belum memadai.

### **b. Faktor Penentu (*Determinants*)**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bertepatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menurut Bapak Drs. Jhon Heri selaku Kepala Dinas Pendidikan tentang bagaimana determinan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang masih banyak kekurangan karena sekolah negeri sangat sedikit dibandingkan sekolah swasta sedangkan di Kabupaten Empat Lawang banyak masyarakat kurang mampu di sekolah swasta masih ada iuran setiap bulannya ke sekolah.

Determinan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dengan adanya program bantuan, Jenis bantuan yang kita berikan kepada sekolah negeri dan swasta itu berbeda jumlahnya. Karena memang sekolah Swasta masih memungut biaya kepada Wali Murid jadi tidak seluruh anggaran kita berikan. Beda dengan sekolah negeri yang memang kewenangan di pegang penuh oleh pemerintah. Jenis bantuan pemerintah Kabupaten Empat Lawang itu untuk siswa yang berprestasi, Siswa Kurang Mampu, Tahfiz Qur'an. Untuk bantuan sekolah Negeri tingkat SD Rp 28.000/Perbulan, Sekolah Negeri tingkat SMP Rp.90.000/Perbulan sedangkan Sekolah Negeri tingkat SMA Rp.170.000/Perbulan. Semuanya kami keluarkan setiap tahunnya. Dan untuk bantuan sekolah Swasta untuk Tingkat Sekolah Dasar Rp.10.000/Perbulan, Sekolah Tingkat SMP Rp.15.000/Perbulan, Untuk Sekolah Tingkat SMA Rp.25.000/Perbulan. masih sama kami turunkan dana bantuannya setiap tahunnya supaya tidak terjadinya anak putus sekolah.

Dari hasil mengenai determinan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dapat dikatakan bahwa di daerah Empat Lawang ini masih sangat membutuhkan bantuan karena sedikitnya sekolah negeri jika masuk sekolah swasta masih banyak bayaran maka dari itu di sekolah negeri memberikan bantuan supaya mengurangi anak yang putus sekolah.

### **c. Tujuan atau Dampak (*Goal And Outcomes*)**

Tujuan atau dampak adalah kunci untuk memutuskan atau merencanakan apa yang harus dilakukan jika pekerjaan harus dilakukan, dan disertai dengan jaringan prosedur, politik, anggaran dan identifikasi program. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan tentang bagaimana dampak kebijakan program belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang bahwa dalam melakukan kebijakan ini sekarang tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Sebab ada BOS Pusat dan BOSDA (bos daerah) dan beberapa beasiswa lainnya dan untuk sekolah negeri sudah di gratiskan namun tidak dengan swasta, karena memang swasta memiliki kewenangan sendiri. Dari hasil mengenai dampak kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang sekarang tidak ada lagi anak putus sekolah tetapi untuk biaya iuran di sekolah swasta belum bisa teratasi karena bukan wewenang pemerintah.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Tahapan Intervensi**

Pada tahapan intervensi penelitian ini meliputi beberapa komponen yang terdiri dari regulasi program wajib belajar 12 tahun, rencana program, fasilitas pelaksanaan program, APBD Pendidikan Kabupaten Empat Lawang . Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa ada kekurangan lokal atau ruang belajar sehingga diadakan sekolah dua *shift*. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus memperhatikan jumlah sekolah dengan jumlah siswa yang bersekolah. Sehingga pemerintah mudah dalam mengatur jumlah rasio siswa dalam satu kelas, serta gedung yang tersedia. Sistem belajar dua *shift* Sangat tidak efektif untuk dijadikan waktu belajar, seharusnya kegiatan belajar yang diberikan oleh guru efektifnya ada di pagi hari karena jika sudah siang dikhawatirkan kondisi siswa yang sudah tidak efektif dalam kegiatan belajar apalagi dalam memahami materi yang diajarkan. Dalam dunia pendidikan ruangan serta tempat belajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran , ruang kelas harus mempunyai lahan yang luas. Tidak hanya cukup untuk ruangan yang dibatasi dinding saja atau pun bentuk bangunan. Sangat menarik sekali jika ruangan tersebut bisa di desain oleh guru ataupun pendidik menjadi sebuah tempat yang nyaman dan kondusif untuk menimba ilmu. Oleh karena itu ruangan belajar sangat berpengaruh dalam kegiatan proses belajar agar siswa tidak jenuh dan nyaman dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk jenjang SMK pemerintah harus memfasilitasi sekolah dengan berbagai alat untuk melakukan praktik sesuai dengan kejuruan yang mereka ambil. Agar mereka bisa berlatih dalam mengembangkan kemampuan mereka.

Guru adalah tokoh yang berperan besar di dalam proses belajar, guru juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak bangsa. Kekurangan guru sangatlah mengganggu dalam proses belajar mengajar. Karena efektif dalam bersekolah apalagi untuk tingkat SD untuk kelas 1,2,3 itu memerlukan guru minimal 2 di kelas, karena cara itu bisa mempermudah dalam menyampaikan materi kepada murid, satu guru untuk menerangkan dan satu guru lagi membantu dalam mengontrol proses anak-anak mencerna pelajaran yang sedang diajarkan. Di karenakan dari segi waktu belajar yang kurang efektif dan juga kurangnya guru. Hal ini yang memang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk lebih memperhatikan tentang keberadaannya guru. Kekurangan guru di berbagai jenjang khususnya SD membuat program wajib belajar tersebut bisa dikatakan belum berhasil.

Selanjutnya pada APBD pendidikan Kabupaten Empat Lawang masih sangat” pas-pasan”. Sebuah program atau kebijakan yang baik tanpa di barengi dengan tindakan yang tepat maka hanya akan menjadi program yang *premature* dan bisa di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan dana salah satunya adalah BOS. Dana BOS seharusnya bisa menutupi atau menggantikan biaya biaya pendidikan anak-anak sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat tidak bersekolah di karenakan tidak ada biaya. Tetapi kenyataan keberadaan dana BOS ini tidak serta merta menutupi biaya pendidikan anak-anak.

Pemerintah seharusnya memilah dalam memberikan bantuan atau sumbangan di setiap sekolah. Dari mulai mengatur dan memeriksa setiap pembelian apa saja yang dibelanjakan oleh sekolah tersebut. Jika barang tersebut tidak terlalu penting dalam proses belajar sebaiknya dikalahkan dan digantikan dengan barang yang memang sangat bermanfaat dalam kegiatan proses belajar. Pemerintah harus menambah anggaran pendidikan Kabupaten Empat Lawang untuk mengembangkan pendidikan dengan cara membangun unit sekolah baru dari mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Karena hal ini sangat berhubungan sekali dengan proses belajar mengajar. Jika gedung sekolah yang di pakai merupakan bangunan lama dikhawatirkan gedung tersebut akan runtuh disaat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Merenovasi gedung lama serta memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dapat membantu proses belajar mengajar menjadi sangat efektif karena daya dukung menyampaikan materi pelajaran didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

#### **b. Tahapan Determinan**

Pada tahapan determinan dalam penelitian ini meliputi beberapa komponen yaitu daya tampung sekolah, Bantuan Operasional sekolah dari pemerintah yaitu BOS, Bantuan Operasional Pemerintah Daerah yaitu BOSDA, Sekolah gratis. Daya tampung, analisis tahap determinan. Pendidikan di Kabupaten Empat Lawang sudah mengalami kemajuan dari mulai mendirikan sekolah baru USB dan merenovasi gedung-gedung sekolah yang lama. Untuk BOS pusat persiswa mendapatkan jumlah yang masih dikatakan sedang dikarenakan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini yang dapat hanya di sekolah Negeri saja sedangkan swasta belum ada. Dan untuk BOSDA ini ternyata pada tingkat SMA Negeri mendapatkan bantuan yang lumayan besar yaitu Rp 2.040.000/pertahun , lebih besar dari jumlah BOS pusat yang setiap tahunnya Rp 1.400.000.

Jenjang SMA dan SMK Kabupaten Empat Lawang mulai tahun 2017 kewenangan sudah diambil alih oleh pihak Provinsi Sumatera Selatan . Peralihan kewenangan SMA dan SMK Kabupaten Empat Lawang ke Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa manfaat yang sudah dipertimbangkan antara pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan hal ini diinginkan terjadinya pemerataan di bidang pendidikan secara masif di Provinsi. Sebagaimana di ketahui, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan provinsi. Dengan adanya peraalihan kewenangan pengelolaan juga bermanfaat untuk percepatan pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi cepat terlaksana, karena pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih fokus dalam pembinaan tingkat SD dan SMP. Namun dengan adanya pengalihan kewenangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang masih tetap menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun ini, dan pemerintah Kabupaten Empat Lawang sedang berusaha agar kewenangan SMA dan SMK dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar pemerintah lebih mudah dalam mengatur penarapan program wajib belajar 12 tahun.

Sekolah gratis pada di Kabupaten Empat Lawang hanya berlaku pada sekolah Negeri saja sedangkan Swasta masih dibungut biaya tersendiri kecuali siswa yang tidak mampu mereka dibantu oleh pemerintah. Untuk

penerapan sekolah gratis ini sekolah swasta mengeluh di karenakan masyarakat lebih tertarik ke sekolah Negeri yang gratis dibandingkan Swasta yang masih dipungut biaya.

### c. Tahapan Dampak

Pada tahapan dampak dalam penelitian ini meliputi komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui tiga pendatan. Tiga pendekatan tersebut mencakup tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga pendekatan tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan untuk angka harapan hidup waktu lahir dan kematian Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator antara melek huruf dan rata-rata lama sekolah Untuk IPM Kabupaten Empat Lawang pada 2017 sebesar 79,63%.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan dengan seluas-luasnya untuk masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase masyarakat menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah biasanya dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), Analisis Dampak. Dan APK 114.26% dan APM SD 100.12%. APK SMP 105.00% dan APM SMP 96.00%. APK SMA 105.00% dan APM SMA 96.00% untuk hasil evaluasi IPM, APK dan APM sudah di kategorikan dalam keberhasilan dengan persentase tinggi.

## 4Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dapat di kategorikan sudah terimplementasi dengan baik, namun masih ada kekurangan pada masing-masing tahapan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari tiga tahapan berikut:

- a. Tahap Intervensi dapat dikatakan terdapat kekurangan dari segi perencanaan. Karena pada regulasi program wajib belajar 12 tahun ini didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Fasilitas Program yang kurang dengan terbatasnya daya tampung peserta didik, kurangnya tenaga pendidik (Guru) dan APBD yang sangat pas-pasan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) serta renovasi gedung-gedung sekolah yang masih merupakan bangunan lama. Dan dari segi perencanaan program wajib belajar 12 tahun sudah dikatakan baik namun sarana pendukungnya saja masih kurang memadai.
- b. Tahap Determinan dapat dikategorikan dalam keberhasilan kurang, dikarenakan daya tampung sekolah yang masih kurang memadai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang sudah rutin turun setiap tahunnya. Dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) dari pemerintah daerah yang masih kurang dan tidak ada penambahan di tiap tahunnya. Dan sekolah gratis yang berlaku hanya pada sekolah Negeri saja sedangkan jumlah sekolah Negeri di Kabupaten Empat Lawang masih sangat terbatas. Sedangkan sekolah swasta lebih banyak tetapi masih memungut biaya iuran bulanan.
- c. Tahap Dampak dapat dikatakan berhasil dikarenakan IPM Kabupaten Empat Lawang sudah lebih baik pada 2012 ditambah lagi dengan hasil persentase dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang juga sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Empat Lawang berbatasan dengan daerah Bengkulu sehingga pembangunan pendidikan Kabupaten Empat Lawang terpengaruh dengan Kota yang Sudah maju.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan mengajukan saran, dalam melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang  
Pada umumnya program wajib belajar 12 tahun sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu ditingkatkan

lagi dari segi jumlah sekolah dan anggaran bantuan pendidikan yang sebaiknya terus dikembangkan dikarenakan kebutuhan dari tahun ke tahunnya yang semakin naik. Melakukan evaluasi bersama secara berkala pemerintah Kabupaten Empat Lawang guna membahas keberlangsungan dalam penerapan program Wajib belajar 12 tahun. Dalam kegiatan perencanaan program wajib belajar 12 tahun bagian perencanaan harus memperhatikan segi perencanaan dan mempersiapkan hal-hal yang di butuhkan dalam proses penerapan program wajib belajar 12 tahun, secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

b. APBD Pendidikan Kabupaten Empat Lawang

Pendanaan dan bantuan pendidikan yang ada di Kabupaten Empat Lawang masih sangat “pas-pasan”. Pemerintah harus menambah anggaran pendidikan, agar program wajib belajar 12 taun ini dapat terus berkembang sehingga hasilnya akan berpengaruh dalam proses penerapan wajib belajar 12 tahun.

**5Daftar pustaka**

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dodi, I. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122.
- Karding, A. K. (2008). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SEMARANG [Universitas Diponegoro]. In *Pasca sarjana UnDip*. [http://eprints.undip.ac.id/16087/1/ABDUL\\_KADIR\\_KARDING.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16087/1/ABDUL_KADIR_KARDING.pdf)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Pendidikan Jarak Jauh, 1 (2013). <https://lppmp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Permen-Nomor-109-tahun-2013-ttg-PJJ.pdf>
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Puspitasari, D. (2012). Evaluasi pelaksanaan program pembelajaran keterampilan memasak di sekolah menengah atas (SMA) No. 11 Yogyakarta. *Eprints Uny*. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/20101>
- Soekartawi. (2006). BLENDED e-LEARNING: ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI INDONESIA. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.